

**ANALISIS PELAPORAN DAN PENYERAPAN
ANGGARAN DUKUNGAN OPERASIONAL
BHABINKAMTIBMAS POLSEK BINTAN
TIMUR BERDASARKAN PERATURAN
KAPOLRI NOMOR 5 TAHUN 2022**

SKRIPSI

OLEH

RADILLA ELSAYANI

NIM: 19622105

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2023**

**ANALISIS PELAPORAN DAN PENYERAPAN
ANGGARAN DUKUNGAN OPERASIONAL
BHABINKAMTIBMAS POLSEK BINTAN
TIMUR BERDASARKAN PERATURAN
KAPOLRI NOMOR 5 TAHUN 2022**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi

Oleh

RADILLA ELSAYANI

NIM: 19622105

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2023**

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS PELAPORAN DAN PENYERAPAN
ANGGARAN DUKUNGAN OPERASIONAL
BHABINKAMTIBMAS POLSEK BINTAN
TIMUR BERDASARKAN PERATURAN
KAPOLRI NOMOR 5 TAHUN 2022**

Ditujukan Kepada:

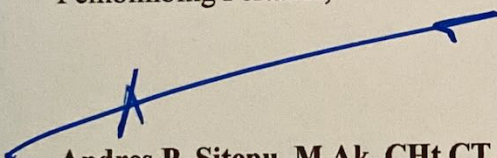
Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan (STIE)
Tanjungpinang

Oleh:

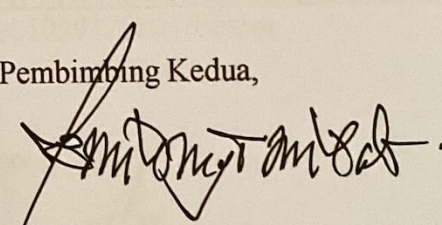
Nama : Radilla Elsayani
NIM : 19622105

Menyetujui:

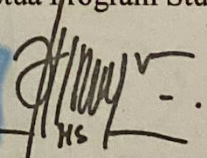
Pembimbing Pertama,


Andres P. Sitepu., M.Ak., CHt, CT.NNLP
NIDK. 8854290019/Asisten Ahli

Pembimbing Kedua,


Bambang Sambodo, S.E., M.Ak
NIDK. 8833900016/Lektor

Mengetahui,
Ketua Program Studi


Hendy Satria, S.E., M.Ak., CAO. CBFA
NIDN. 1015069101/Lektor



SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS PELAPORAN DAN PENYERAPAN
ANGGARAN DUKUNGAN OPERASIONAL
BHABINKAMTIBMAS POLSEK BINTAN
TIMUR BERDASARKAN PERATURAN
KAPOLRI NOMOR 5 TAHUN 2022**

Yang Dipersiapkan Dan Disusun Oleh :

Nama : Radilla Elsayani

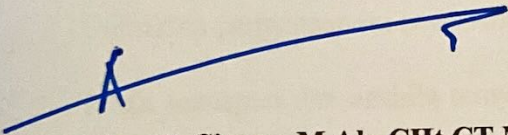
NIM : 19622105

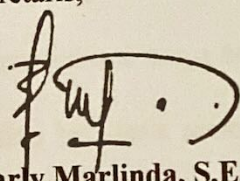
Telah dipertahankan didepan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal
Dua Belas Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan Dinyatakan
Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian

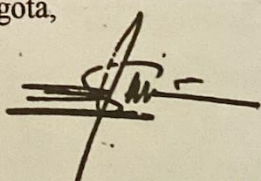
Ketua,

Sekretaris,


Andres P. Sitepu., M.Ak., CHt, CT, NNLP
NIDK. 8854290019/Asisten Ahli

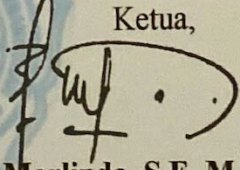

Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA
NIDN.1029127801/Lektor

Anggota,


Sri Kurnia, SE., Ak., M. Si., CA
NIDN 1020037101/Lektor

Tanjungpinang, 12 Juli 2023
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang

Ketua,


Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA
NIDN.1029127801/Lektor

PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

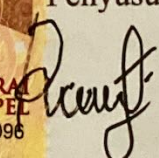
Nama : Radilla Elsayani
NIM : 19622105
Tahun Angkatan : 2019
IPK : 3.42
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Pelaporan dan Penyerapan Anggaran Dukungan
Operasional Bhabinkamtibmas Polsek Bintang Timur
Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2022

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata dikemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 12 Juli 2023

Penyusun,



RADILLA ELSAYANI
NIM. 19622105

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, ku persembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang ku sayangi :

- ❖ Untuk Bapakku Salim Amat Iman dan Ibuku Istikomah yang tercinta, yang selalu memberikan kenyamanan, motivasi dan doa terbaik serta dukungan sehingga saya bisa menyelesaikan masa studi saya .
- ❖ Untuk abangku Andriansyah dan Rian Amrizal serta kakakku Dina Triyana yang telah memberikan semangat, dukungan serta doanya.
- ❖ Untuk Keponakanku Zahra Jairanisa dan M. Zahfran Al-Hafiz yang selalu menjadi penyemangat untukku.
- ❖ Untuk teman-temanku Akuntansi Sore 1 yang selalu membantu serta memberikan dukungan selama mengikuti perkuliahan.

MOTTO

"Waktu bagaikan pedang. Jika kau tidak memanfaatkannya dengan baik,
maka ia akan memanfaatkanmu."

(HR Muslim)

"Tahapan pertama dalam mencari ilmu adalah mendengarkan, kemudian
diam dan menyimak dengan penuh perhatian, lalu menjaganya, lalu
mengamalkannya, dan kemudian menyebarkannya."

(Sufyan bin Uyainah)

"Barangsiapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan
tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri."

(QS. Al-Ankabut:6)

"Ilmu tidak bisa diperoleh dengan mudah, ia harus diusahakan
dipikirkan dan diperjuangkan, seperti barang berharga."

(Radilla Elsayani)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan usulan penelitian dengan judul **“ANALISIS PELAPORAN DAN PENYERAPAN ANGGARAN DUKUNGAN OPERASIONAL BHABINKAMTIBMAS POLSEK BINTAN TIMUR BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 5 TAHUN 2022”** penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata (S1) Program studi Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang.

Dalam penyusunan usulan penelitian ini, banyak pihak-pihak yang turut serta membantu mulai dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, SE., M.Si., Ak., CA selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, S.E., Ak., M.Si., CA selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak M. Rizki, S.Psi., M.Hsc selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

5. Bapak Hendy Satria, S.E., M.Ak., CAO. CBFA selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
6. Bapak Andres P Sitepu, SE., M.Ak., CHt, CT.NNLP selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, saran, dan perbaikan terhadap penyusunan usulan penelitian ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak Bambang Sambodo, SE., M.Ak selaku dosen pembimbing II yang telah membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta dan staf sekretariat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
9. Kepada Kepala Kepolisian Sektor Bintan Timur beserta Anggota yang telah memberikan izin penelitian serta dukungan dan motivasi dalam pelaksanaan penelitian.
10. Orangtua dan keluarga yang telah memberikan doa, dorongan dan semangat kepada penulis selama menyelesaikan perkuliahan serta penyusunan skripsi.
11. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2019 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang khususnya kelas Sore I Akuntansi yang memberikan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan Skripsi ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang

dapat membangun guna pembelajaran dimasa yang akan datang. Dan atas segala jasa serta budi baik dari berbagai pihak yang disebutkan diatas, akhir kata penulis berharap semoga usulan penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya mahasiswa-mahasiswi Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang.

Tanjungpinang, 12 Juli 2023

Penulis

RADILLA ELSAYANI
NIM.19622105

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN

HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN

HALAMAN PERNYATAAN

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN MOTO

KATA PENGANTAR..... viii

DAFTAR TABEL xiv

DAFTAR GAMBAR..... xv

DAFTAR LAMPIRAN xvi

ABSTRAK xvii

ABSTRACT xviii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah..... 1

1.2 Rumusan Masalah 6

1.3 Batasan Masalah..... 6

1.4 Tujuan Penelitian 6

1.5 Kegunaan Penelitian..... 7

1.5.1 Kegunaan Ilmiah 7

1.5.2 Kegunaan Praktis 7

1.6 Sistematika Penulisan 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori..... 10

2.1.1	Pengertian Laporan	10
2.1.2	Laporan Pertanggungjawaban Keuangan.....	11
2.1.2.1	Pengertian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan.....	11
2.1.2.2	Tujuan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	11
2.1.3	Anggaran	12
2.1.3.1	Pengertian Anggaran.....	12
2.1.3.2	Kegunaan Anggaran.....	13
2.1.3.3	Tujuan Penggunaan Anggaran	13
2.1.3.4	Tujuan Penyusunan Anggaran	14
2.1.3.5	Keunggulan dan Kelemahan Anggaran	15
2.1.4	Anggaran Operasional.....	17
2.1.5	Kebijakan Kapolri Nomor 5 Tahun 2022.....	19
2.2	Kerangka Pemikiran.....	21
2.3	Penelitian Terdahulu	22

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1	Pengertian Metode Penelitian	28
3.2	Jenis Penelitian.....	28
3.3	Jenis Data	29
3.3.1	Data Primer	29
3.3.2	Data Sekunder	29
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.4.1	Observasi.....	30
3.4.2	Wawancara	30
3.4.3	Dokumentasi	31
3.4.4	Studi Kepustakaan.....	32

3.5 Teknik Pengolahan Data	32
3.5.1 Reduksi Data	32
3.5.2 Penyajian Data	33
3.5.3 Penarikan Kesimpulan	33

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan.....	34
4.1.1 Gambaran Umum Polsek Bintang Timur.....	45
4.1.1.1 Visi Polsek Bintang Timur.....	34
4.1.1.2 Misi Polsek Bintang Timur	34
4.1.1.3 Struktur Organisasi Polsek Bintang Timur	36
4.1.1.4 Tugas dan Fungsi Polsek Bintang Timur	37
4.2 Hasil Penelitian	46
4.2.1 Laporan Pertanggungjawaban Bhabinkamtibmas.....	46
4.2.2 Penyerapan Anggaran Dukungan Operasional Bhabinkamtibmas.....	52
4.3 Pembahasan.....	57
4.3.1 Penerapan Kebijakan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan.....	57
4.3.2 Penerapan Kebijakan Anggaran Dukungan Operasional Bhabinkamtibmas.....	62

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	65
5.2 Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1. 1	Realisasi Anggaran Polsek Bintang Timur Tahun 2021.....	3
Tabel 3. 1	Jumlah Responden Wawancara.....	31
Tabel 4. 1	Keterangan Simbol-Simbol Flowchart	50
Tabel 4. 2	Rencana Penyerapan Anggaran Bhabinkamtibmas.....	54
Tabel 4. 3	Penerapan Kebijakan Laporan Pertanggungjawaban	61
Tabel 4. 4	Penerapan Kebijakan Anggaran	64

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2. 1	Kerangka Pemikiran.....	22
Gambar 4. 1	Struktur Organisasi Polsek Bintan Timur.....	36
Gambar 4. 2	Flowchart Pembuatan Laporan Bhabinkamtibmas.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran:	Judul Lampiran
Lampiran 1:	Hasil Wawancara Kanit Binmas dan Panit Binmas
Lampiran 2:	Hasil Wawancara Sium Polsek Bintan Timur
Lampiran 3:	Hasil Wawancara Staf Unit Binmas Polseek Bintan Timur
Lampiran 4:	Hasil Wawancara Bhabinkamtibmas Polsek Bintan Timur
Lampiran 5:	Pengalokasian Anggaran Bhabinkamtibmas Polsek Bintan Timur
Lampiran 6:	Realisasi Duk Ops Bhabinkamtibmas Tahun 2022
Lampiran 7:	Dokumentasi
Lampiran 8:	Presentase Pelagiat

ABSTRAK

ANALISIS PELAPORAN DAN PENYERAPAN ANGGARAN DUKUNGAN OPERASIONAL BHABINKAMTIBMAS POLSEK BINTAN TIMUR BERDASARKAN PERATURAN KEPOLRI NOMOR 5 TAHUN 2022

Radilla Elsayani. 19622105. Akuntansi. STIE Pembangunan Tanjungpinang.
reلسayani03@gmail.com

Dalam penelitian ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan di Polsek Bintan Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kebijakan Kapolri Nomor 5 Tahun 2022 tentang administrasi pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terkhusus di Polsek Bintan Timur.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 16 orang yang terdiri dari Kepala Unit, Panit, Sium, Staf dan para Bhabinkamtibmas. Penelitian ini menggunakan tes wawancara kepada semua responden dengan menyebarkan butir-butir pertanyaan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa administrasi laporan pertanggungjawaban dan penyerapan anggaran dukungan operasional Bhabinkamtibmas Polsek Bintan Timur masih belum berjalan secara efektif dan dibuktikan dengan belum adanya sistem informasi seperti flowchart serta penyerapan anggaran dukungan operasional masih menggunakan transaksi secara manual.

Adapun dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan Kapolri Nomor 5 Tahun 2022 masih belum terlaksana dengan baik dikarenakan banyaknya tugas yang diemban sehingga memperhambat penyelesaian dalam membuat laporan. Dalam proses pencairan anggaran dukungan operasional masih sering terlambat dikarenakan proses pengajuan rencana kebutuhan masih harus sering terlambat dari waktu yang telah ditentukan.

Kata Kunci : Anggaran Operasional, Laporan pertanggungjawaban, Kebijakan

Dosen Pembimbing : 1. Andres P, Sitepu.,M.Ak.,CHt,CT,NNLP
2. Bambang Sambodo, S.E., M.Ak

ABSTRACT

REPORTING AND ABSORPTION ANALYSIS OPERATIONAL SUPPORT BUDGET BHABINKAMTIBMAS POLSEK BINTAN EAST BY REGULATION POLRI NUMBER 5 OF 2022

Radilla Elsayani. 19622105. Akuntansi. STIE Pembangunan Tanjungpinang.
relsayani03@gmail.com

In this research is the result of research conducted at the East Bintan Polsek. This study aims to analyze the implementation of the National Police Chief's Policy Number 5 of 2022 regarding the administration of financial accountability within the Indonesian National Police, specifically at the East Bintan Police.

The method used in this research is descriptive qualitative method. The subjects in this study totaled 16 people consisting of Unit Heads, Panit, Sium, Staff and Bhabinkamtibmas. This study uses an interview test to all respondents by distributing the questions.

The results of this study indicate that the administration of accountability reports and the absorption of operational support budgets for Bhabinkamtibmas Polsek East Bintan are still not running effectively and is evidenced by the absence of information systems such as flowcharts and the absorption of operational support budgets still using manual transactions.

As for this research, it can be concluded that the National Police Chief's policy Number 5 of 2022 has not been implemented properly due to the many tasks being carried out, which has hampered the completion of making reports. In the process of disbursing the operational support budget, it is still often late because the process of submitting a needs plan must often be late from the predetermined time.

Keywords: *Operational Budget, Accountability Report, Policy*

Dosen Pembimbing : 1. Andres P, Sitepu.,M.Ak.,CHt,CT.NNLP
2. Bambang Sambodo, S.E., M.Ak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) memiliki peran yang penting yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi Kepolisian, meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Setiap provinsi yang ada di Indonesia ini mendapatkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dari institusi Polri secara terstruktur. Dimulai dari tingkat provinsi yang diemban oleh jajaran Polda, tingkat kabupaten/kota yang diemban oleh jajaran Polres hingga ke satuan terkecil yaitu Polsek yang mengemban di wilayah kecamatan.

Dalam satuan tugas operasi Satgasres (Satuan Tugas Resor) yang salah satunya ialah Satgasres Preemtif. Di dalam Satgasres Preemtif terbagi lagi menjadi beberapa subsatgasres, diantaranya Subsatgasres Binmas. Subsatgasres Binmas ini bertugas dalam melaksanakan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat, elemen dan kelompok serta komunitas (tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh politik). Subsatgasres Binmas ini terdiri

dari satuan Binmas yang ada di setiap Polres. Di bawah satuan Binmas tersebut terdapat satu unsur yang dinilai sangat melekat dengan masyarakat unsur tersebut dikenal dengan Bhabinkamtibmas.

Bhabinkamtibmas merupakan singkatan dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang melaksanakan pembinaan masyarakat meliputi kegiatan pemberdayaan polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, serta kegiatan kerjasama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di desa/kelurahan. Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat bahwa yang dimaksud dengan Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas di desa/kelurahan. Salah satu tugas pokok Bhabinkamtibmas adalah membina warga masyarakat atau kelompok komunitas dengan cara memberikan penyuluhan dan pembimbingan dalam rangka menumbuhkan perubahan sikap, perilaku, dan terbentuknya kesadaran/ketaatan hukum guna menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif.

Anggaran pada salah satu institusi publik yaitu POLRI khususnya anggaran operasional Bhabinkamtibmas, merupakan anggaran yang harus disusun dengan sangat teliti. Anggaran yang disusun harus sesuai dengan kebutuhan. Suatu anggaran harus berkaitan dengan dana-dana yang akan dikeluarkan dan tujuan yang akan dicapai. Anggaran termasuk rencana tentang kegiatan POLRI yang mencakup kegiatan yang mencakup kegiatan operasional yang berkaitan

Tabel 1.1
Tabel Realisasi Anggaran Bhabinkamtibmas Polsek Bintang Timur
Tahun 2022

Kode	Uraian	Volume	Harga Sat	Bintim
5076.BK A.003	Penguat Peran Bhabinkamtibmas	51 Laporan		196.560.000
003	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan			196.560.000
IW	Operasional Variabel			196.560.000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya			196.560.000
	>Dukungan Operasional Bhabinkamtibmas			196.560.000
	- Uang Makan	3024 OH	30.000	90.720.000
	- Dana Satuan	3024 OH	35.000	105.840.000

Sumber : Data Pengalokasian Anggaran Polsek Bintang Timur Tahun 2021

Berdasarkan data pengalokasian anggaran Bhabinkamtibmas Polsek Bintang Timur tahun 2021, dukungan operasional Bhabinkamtibmas terdiri dari uang makan dan dana satuan. Uang makan yang dipergunakan untuk membiayai seluruh biaya-biaya uang makan Bhabinkamtibmas selama menjalankan kegiatan membina warga masyarakat atau kelompok komunitas. Dana satuan Bhabinkamtibmas yang dipergunakan untuk membiayai segala macam kebutuhan yang diperlukan dalam kegiatan membeli media perlengkapan seperti spanduk serta alat-alat tulis kantor yang dibutuhkan dalam menjalankan kegiatan setiap harinya.

Dalam kepolisian, anggaran operasional adalah anggaran yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan rutin pihak kepolisian. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 Tentang

Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang administrasi pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pertanggungjawaban keuangan yang disebut juga perwabku adalah dokumen laporan keuangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran uang yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen bukti adalah dokumen administrasi yang diperlukan berdasarkan bukti-bukti yang sah sebagai dasar pengeluaran uang Negara yang bersumber dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dan merupakan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan perundang-undangan. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan Penggunaan Anggaran dalam melaksanakan kegiatan.

Pelaporan dalam kegiatan Bhabinkamtibmas adalah sejumlah informasi atau gambaran yang diberikan kepada pimpinan tentang hasil pelaksanaan kinerja Bhabinkamtibmas yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penyusunan laporan ini sebagai bahan masukan kepada pimpinan dalam menentukan kebijaksanaan dan peningkatan pelaksanaan dan kualitas kinerja serta sebagai bahan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan suatu kegiatan.

Dalam penelitian ini membahas tentang Polsek Bintan Timur, yang dimana Kepolisian Sektor adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian di wilayah kecamatan yang berada di bawah Kapolres. Kepolisian Sektor yang dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek). Polsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas polri lainnya dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Polsek ini mengemban tugas di daerah wilayah kecamatan. Polsek Bintan Timur yang mengemban tugas di daerah Kecamatan Bintan Timur yang terdiri dari 3 kecamatan yaitu, Kecamatan Bintan Timur, Kecamatan Mantang dan Kecamatan Bintan Pesisir. Dalam Kepolisian Sektor ini juga terdiri dari beberapa bagian unit kepolisian yang diantaranya unit Provos, unit Reskrim, unit Intelkan, unit Binmas, unit Samapta dan unit Lantas.

Anggaran biaya operasional merupakan faktor penting dalam memperoleh tunjangan Bhabinkamtibmas, dimana biaya operasional dapat membantu mengukur biaya dan efisiensi dan kebutuhan yang diperlukan. Selain biaya operasional dalam penelitian ini dinilai ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tunjangan biaya operasional yaitu pelaporan yang biayanya dapat dilakukan atau dibayarkan setelah melaksanakan kegiatan di setiap bulannya.

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pelaporan dan Penyerapan**

Anggaran Dukungan Operasional Bhabinkamtibmas Polsek Bintan Timur Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2022“.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pelaporan dan penyerapan anggaran dukungan operasional Bhabinkamtibmas Polsek Bintan Timur?
2. Apakah pelaporan dan penyerapan anggaran dukungan operasional Bhabinkamtibmas Polsek Bintan Timur sudah sesuai dengan peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2022?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian dapat terarah dan untuk menghindari permasalahan, maka perlu adanya pembatasan masalah. Subjek dalam penelitian ini mengenai Analisis Pelaporan dan Penyerapan Anggaran Dukungan Operasional Bhabinkamtibmas berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2022. Objek pada penelitian ini adalah Kepolisian Sektor Bintan Timur tahun anggaran 2022.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab perumusan masalah yang diberikan, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaporan dan penyerapan anggaran dukungan operasional Bhabinkamtibmas Polsek Bintan Timur.

2. Untuk mengetahui apakah pelaporan dan penyerapan anggaran dukungan operasional Bhabinkamtibmas Polsek Bintang Timur sudah sesuai dengan peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2022.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Ilmiah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk menambah wawasan, ilmu pengetahuan, dan informasi mengenai laporan pertanggungjawaban dan penyerapan anggaran dukungan operasional Bhabinkamtibmas Polsek Bintang Timur dan dapat memberikan manfaat kepada peneliti selanjutnya yang juga membahas dengan topik sejenis.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

Untuk menerapkan teori-teori serta pengetahuan yang didapat dalam masalah yang sebenarnya terjadi di Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya dalam laporan pertanggungjawaban keuangan serta anggaran dukungan operasional Bhabinkamtibmas Polsek Bintang Timur.

2. Bagi Polsek Bintang Timur

Sebagai bahan informasi dan masukan dalam mengetahui anggaran operasional Bhabinkamtibmas terhadap tunjangan yang diterima Bhabinkamtibmas Polsek Bintang Timur.

3. Bagi STIE Pembangunan Tanjungpinang

Diharapkan kepada mahasiswa/mahasiswi STIE Pembangunan Tanjungpinang dapat dijadikan referensi atau masukan untuk mahasiswa/mahasiswi STIE Pembangunan Tanjungpinang.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini maka dibuatlah sistematika penulisan yang terdiri dari beberapa bab, yang tersusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis mengemukakan dengan rinci tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini mencakup teori-teori yang berhubungan dengan uraian yang berisi tentang ungkapan tentang penelitian sebelumnya dan kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Teori-teori ini diambil dari beberapa jurnal yang saling mendukung untuk memecahkan permasalahan yang akhirnya mencapai tujuan penelitian, kerangka pemikiran dan penelitian terdahulu.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari objek penelitian, jenis

data, metode pengumpulan data, teknik populasi dan sampling, definisi operasional variable dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang hasil dan pembahasan. Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian dan analisis data serta pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini diharapkan tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan skripsi ini dan akan disampaikan pula saran bagi pihak terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Pengertian Laporan

Laporan merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pimpinan baik secara lisan maupun tertulis sehingga dalam penerimaan laporan dapat memperoleh gambaran bagaimana pelaksanaan tugas orang yang memberikan laporan.

Menurut Atmosudirdjo dalam (Afifah Thahira, 2018) laporan adalah setiap tulisan yang berisi hasil pengolahan data/informasi. Laporan sebagai salah satu produk kantor yang diperlukan oleh pimpinan organisasi.

Menurut Priansa (2017b:204) laporan adalah setiap tulisan yang berisi hasil pengolahan data informasi, serta merupakan alat komunikasi yang di dalamnya terdapat beberapa kesimpulan atau rekomendasi dari fakta atau keadaan yang telah diselidik.

Berdasarkan dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa laporan adalah setiap tulisan yang berisikan fakta- fakta atau hasil pengolahan data yang berkaitan dengan tanggung jawab pelapor dan berwujud penyampaian ide/informasi dari satu pihak ke pihak yang lain untuk sebuah kepentingan organisasi.

2.1.2 Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

2.1.2.1 Pengertian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

Laporan pertanggungjawaban keuangan adalah bentuk dokumen laporan keuangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran uang yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Dengan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan, akan lebih mudah mengetahui perkembangan dan proses dari kegiatan yang pernah dibuat. Hal tersebut berguna untuk perencanaan kegiatan yang akan buat di masa yang akan datang.

2.1.2.2 Tujuan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

Laporan pertanggungjawaban keuangan memiliki tujuan karena sangat penting karena memiliki fungsi sebagai bahan evaluasi, sebagai dasar untuk mencatat di pembukuan organisasi serta sebagai laporan keuangan setiap proyek yang dikerjakan. Laporan pertanggungjawaban memiliki tujuan sehingga dibuat secara rinci dan seakurat mungkin. Tujuan laporan pertanggungjawaban keuangan:

1. Laporan pertanggungjawaban keuangan memiliki tujuan untuk menjelaskan secara detil tentang seluruh proses kegiatan, mulai dari persiapan sebelum kegiatan dilaksanakan, pada saat kegiatan sedang berlangsung, dan setelah kegiatan telah selesai dilaksanakan.
2. Laporan pertanggungjawaban keuangan juga memiliki tujuan untuk menjadi referensi dan pelajaran untuk kegiatan berikutnya. Hal ini karena di dalamnya dijelaskan beragam masalah yang muncul selama pelaksanaan kegiatan.

3. Laporan pertanggungjawaban keuangan juga bertujuan untuk menjadi alat untuk mengevaluasi kinerja tim dari pelaksana kegiatan di bidang keuangan. Di dalam laporan dijelaskan semua pemasukan dan pengeluaran selama kegiatan, dimana akan dinilai apakah budget yang telah dibuat dan biaya aktual yang terjadi selaras. Dari sini akan terlihat bahwa apakah tim pelaksana kegiatan bertindak efisien dan efektif di dalam pelaksanaannya.

2.1.3 Anggaran

2.1.3.1 Pengertian Anggaran

Anggaran merupakan rencana jangka pendek organisasi yang dinyatakan dalam bentuk keuangan. Menurut Mahmudi (2016) anggaran sektor publik dipresentasikan dalam APBN dan APBD menggambarkan tentang rencana keuangan dimasa datang mengenai jumlah pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, serta program kerja dan aktivitas yang akan dilakukan.

Menurut Lubis (2017) anggaran merupakan rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit satuan moneter dan berlaku untuk jangka waktu periode tertentu yang akan datang. Maka diketahui bahwa anggaran merupakan hasil kerja output terutama berupa taksiran yang dilaksanakan masa mendatang.

Menurut Harispon (2018) anggaran merupakan suatu pendekatan formal yang sistematis dari pelaksanaan tanggung jawab manajer dalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan rencana kegiatan yang menggambarkan tentang rencana keuangan dimasa datang

mengenai jumlah pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, serta program kerja dan aktivitas yang akan dilakukan. Untuk satu periode yang hendak dicapai, yang dinyatakan dalam bentuk finansial.

2.1.3.2 Kegunaan Anggaran

Menurut Harispon (2018) anggaran yang dibuat atau yang disusun untuk kegiatan-kegiatan yang ada dalam perusahaan akan memberikan kegunaan atau fungsi yaitu:

1. Anggaran yang dapat digunakan sebagai pedoman kerja, anggaran yang telah dibuat dijadikan sebagai pedoman, acuan kerja yang harus diikuti kedepan, serta target yang harus dicapai oleh kegiatan perusahaan di waktu yang akan datang.
2. Anggaran dapat digunakan sebagai alat pengkoordinasian kerja, agar semua bagian-bagian yang terdapat didalam perusahaan saling bekerja sama dengan baik, saling menunjang agar berlangsung dan kelancaran jalannya perusahaan terjamin, sehingga akan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
3. Anggaran dapat digunakan sebagai alat pengawasan kerja, anggaran yang disusun digunakan sebagai tolak ukur, perbandingan untuk menilai, evaluasi realisasi kegiatan perusahaan, seperti yang dianggarkan dengan kenyataan sesungguhnya.

2.1.3.3 Tujuan Penggunaan Anggaran

Anggaran yang ada didalam anggaran perusahaan adalah alat di bidang administrasi. Anggaran diklasifikasikan sebagai kebutuhan yang vital bagi perusahaan, yang dimana salah satu peran penting suatu anggaran yang

mengamati laju pertumbuhan ekonomi yang terjadi di perusahaan tersebut. Anggaran dapat disajikan perusahaan mengamati perkembangan laba rugi perusahaan yang terjadi dalam kurun waktu periode tertentu. Laba perusahaan adalah prioritas utama perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya dari tahun ke tahun. Anggaran memainkan peran penting dalam mengendalikan laju pertumbuhan perusahaan. Menurut Nurhadi & Effendy (2020) tanpa penyusunan anggaran yang memadai dan efektif maka perusahaan baik secara operasional maupun secara administrasi akan mengalami hambatan yang cukup berarti.

2.1.3.4 Tujuan Penyusunan Anggaran

Adapun beberapa tujuan penyusunan anggaran menurut Lubis (2017) adalah sebagai berikut:

1. Untuk menyatakan harapan / sasaran perusahaan secara jelas dan formal, sehingga bisa menghindari kerancuan dan memberikan arah terhadap apa yang hendak dicapai manajemen.
2. Untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait sehingga anggaran dapat dimengerti, didukung, dan dilaksanakan.
3. Untuk menyediakan rencana terperinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengaruh yang jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan perusahaan.
4. Untuk mengkoordinasikan cara / metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber daya.
5. Untuk menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu dan kelompok, serta menyediakan informasi yang mendasari perlu tidaknya

tindakan koreksi.

2.1.4.5 Keunggulan dan Kelemahan Anggaran

Penganggaran perusahaan tidak diragukan lagi karena bermanfaat untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran digunakan juga sebagai alat monitoring karyawan, dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh suatu program kerja. Menurut Nurhadi & Effendy (2020) program kerja ini akan memancing jawab karyawan sekaligus menghindari pembiayaan yang dianggap tidak begitu mendesak oleh manajemen sehingga menghasilkan elemen perusahaan.

Anggaran disamping mempunyai banyak manfaat, namun juga mempunyai beberapa kelemahan. Beberapa kelemahan anggaran menurut Nafarin (2015) :

1. Anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan anggapan sehingga mengandung unsur ketidakpastian.
2. Menyusun anggaran yang cermat memerlukan waktu, uang dan tenaga yang tidak sedikit sehingga tidak semua perusahaan mampu menyusun anggaran secara lengkap.
3. Bagi pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran dapat mengakibatkan mereka menentang sehingga anggaran tidak akan efektif.

Anggaran tidak selamanya dapat memberikan manfaat karena anggaran juga memiliki kelemahan. Anggaran bisa saja meleset dari kenyataan yang terjadi. Karena anggaran hanya merupakan rencana, dan rencana tersebut baru berhasil apabila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

Walaupun terdapat banyak manfaat yang diperoleh dengan penyusunan anggaran, tetapi masih ada terdapat keterbatasan-keterbatasan anggaran, Yaitu sebagai berikut:

1. Prediksi kegiatan bisnis dimasa mendatang belum tentu tepat atau belum tentu mendekati kenyataan.
2. Perubahan kondisi politik, sosial, ekonomi, bisnis di masa mendtng sulit diprediksi sehingga tidka terjangkau dalam pemikiran pembuat anggaran.
3. Sering terjadi konflik kepentingan dalam penyusunan anggaran maupun dalam pelaksanaannya.
4. Pembuat anggran (kepala seksi, baguan, divisi) sering berfikir subyektif mementingkan seksinya, bagiannya, atau devisi saja.
5. Anggaran pada umumnya sangat idealistiksehingga sulit dicapai dan dapat mengakibatkan para pelaksana frustasi.

Menurut Nurhadi & Effendy (2020) adapun keunggulan dan kelemahan anggaran sebagai berikut:

1. Output yang ingin dicapai sesuatu jadwal bisa diestimasikan sebelum jadwal itu diimplementasikan.
2. Penetapan penganggaran membutuhkan kajian amat rinci dan detail bagi rencana tindakan yang akan diambil.
3. Anggaran adalah riset bagi pekerjaan mengakibatkan bisa dibuat pedoman dalam mengevaluasi kekutan dan kelemahan dari output dihasilkan.
4. Penganggaran berguna menjadi arah mengendalikan siklus kegiatan pegawai ketika menjalankan program tertentu.

5. Masing-masing pimpinan departemen diikutsertakan untuk membuat penganggaran, sehingga menciptakan rasa turut terlibat dalam penyusunan (*sense of partisipation*).

Namun harus disadari bahwa penganggaran bukanlah suatu angka yang pasti, tetapi merupakan estimasi dan proyeksi terhadap suatu program yang akan dilaksanakan oleh perusahaan sehingga penyusunan anggaran ini mengandung unsur ketidakpastian yang tinggi. Anggaran perusahaan harus disusun secara cermat dan teliti agar menghindari pelaksanaan angggran yang tidak efektif. Oleh Karena itu terdapat pula beberapa kelemahan diantaranya:

1. Ketika membuat penganggaran, taksiran yang digunakan tidak pasti atau tidak sesuai dengan fakta yang ada.
2. Kerap kali kondisi yang dipakai dalam penyusunan anggaran terdapat perubahan melampaui apa yang telah disusun sebelumnya.
3. Tim yang ditunjuk untuk membuat penganggaran mengikutsertakan berbagai pihak, dengan demikian berpotensi menciptakan berbagai masalah dalam pengkoorinasian antar departemen sehingga bisa saja menghalangi proses penganggaran.
4. Pembuatan anggaran pastinya melibatkan evaluasi yang tidak obyektif dari pengambil keputusan, khususnya ketika data dan informasi kurang memadai.

2.1.4 Anggaran Operasional

Anggaran operasional adalah biaya pengeluaran perusahaan yang digunakan untuk menjalankan dan mengelola bisnis perusahaan. Anggaran biasanya disebut sebagai biaya dalam mengoperasikan perangkat, mesin atau

peralatan. Anggaran operasional juga bias menjadi salah satu indikator perusahaan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan selanjutnya. Pengeluaran untuk biaya operasional yang rendah bisa menjadi salah satu pertanda bahwa perusahaan sudah mencapai efisiensi. Hal ini bisa dilihat jika biaya operasional yang rendah dengan output yang tetap atau bertambah maka perusahaan berhasil melakukan efisiensi terhadap bisnis perusahaan.

Anggaran operasional adalah dukungan anggaran semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan/instansi selama kegiatan dalam jangka waktu satu tahun. Anggaran operasioanal ialah anggaran rencana kerja perusahaan yang mencakup:

- a. Anggaran Pendapatan, merupakan rencana biaya yang dibuat perusahaan untuk memperoleh pendapatan pada kurun waktu tertentu.
- b. Anggaran Biaya, merupakan rencana biaya yang akan dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh pendapatan yang direncanakan.

Anggaran biaya dapat dibagi menjadi beberapa kelompok , yaitu:

- a. Anggaran biaya bahan baku adalah biaya semua biaya bahan baku yang akan dikeluarkan perusahaan di dalam suatu periode tertentu dimasa yang akan datang.
- b. Angaran biaya tenaga kerja langsung adalah rencana besarnya biaya yang akan dikeluarkan perusahaan untuk membayar biaya tenaga kerja yang terlibat secara langsung di dalam proses produksi dalam suatu perode tertentu dimasa mendatang.
- c. Anggraan biaya variabel adalah rencana besarnya biaya produksi

diluar biaya bahan baku dan biaya bahan penolong, anggaran biaya tenaga kerja penolong dan lain-lainnya.

- d. Anggaran biaya pemasaran adalah rencana tentang besarnya biaya distribusi yang akan dikeluarkan perusahaan untuk mendistribusikan produknya.
- e. Anggaran biaya administrasi dan umum adalah biaya yang direncanakan untuk operasional kantor administratif di dalam suatu periode tertentu dimasa yang akan datang. Anggaran ini terdiri dari biaya listrik, air, telepon, gaji, dan komisi wiraniaga.
- f. Anggaran laba adalah besarnya laba yang diperoleh perusahaan didalam suatu periode tertentu dimasa yang akan datang . Anggaran laba sebenarnya merupakan gabungan dari anggaran pendapatan dan anggran biaya.

2.1.5 Kebijakan Kapolri Nomor 5 Tahun 2022

Indonesia adalah negara berkembang yang berkeinginan untuk menjadi negara maju, oleh sebab itu banyak perubahan yang dilakukan untuk mencapainya. Terjadi banyak perubahan pada segala sektor di Indonesia, salah satu perubahan tersebut terdapat pada sektor pengelolaan keuangan negara. Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 “keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.” Barang yang dijadikan milik negara memiliki proses dan prosedur dalam pergantian

kepemilikan, sehingga diperlukan pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan negara diatur pada peraturan yang bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan tugas.

Pada penelitian ini peneliti tertarik untuk meneliti mengenai pengelolaan keuangan yang diterapkan pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, terutama pada Kepolisian Sektor Bintan Timur sebagai salah satu Lembaga Negara dan kuasa pengguna anggaran negara semenjak tahun 2010. Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, “Kepolisian Sektor Bintan Timur atau yang biasa disebut Polsek adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri (Polisi Republik Indonesia) diwilayah kecamatan/kelurahan. Polsek Bintan Timur adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Kementrian Negara/Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan administrasi pertanggungjawaban keuangan (perwabkeu) atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Reformasi keuangan Negara dengan munculnya Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maka Kepolisian Negara Republik Indonesia juga harus mengikuti reformasi tersebut. Peraturan-peraturan tersebut belum mencerminkan keadaan di Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga dibuat peraturan khusus. Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia membuat

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 dan disempurnakan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

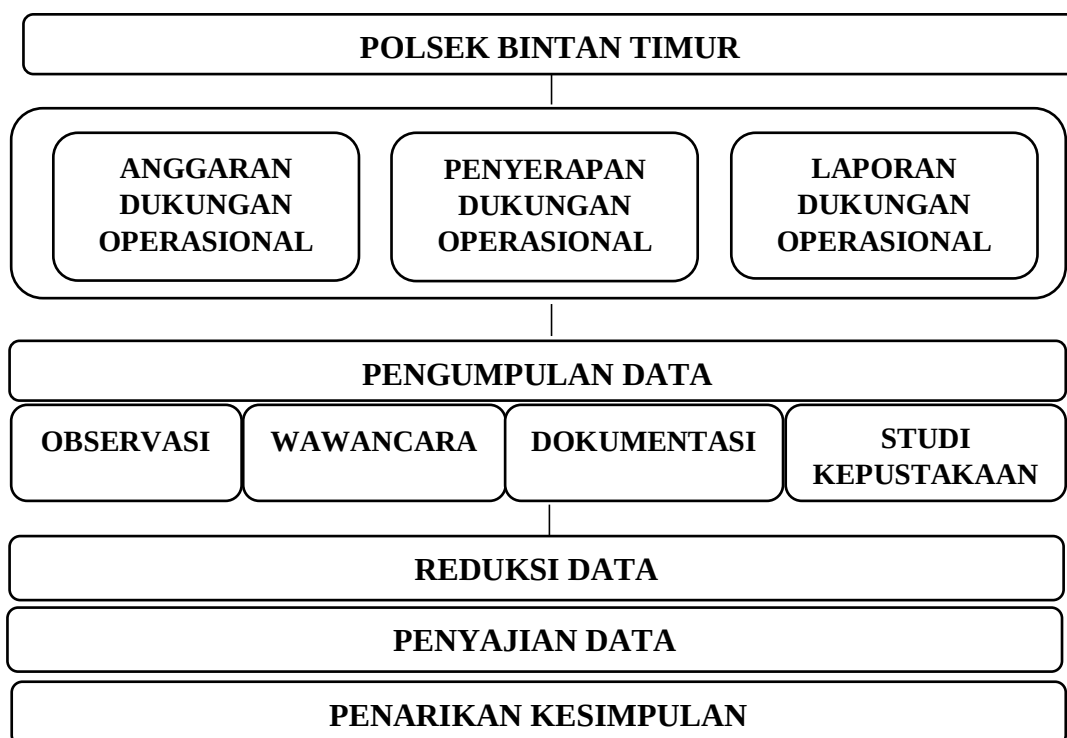
Implementasi kebijakan yang tidak optimal menimbulkan keterlambatan pengumpulan laporan pertanggungjawaban keuangan (perwabkeu). Perwabkeu itu sendiri adalah dokumen laporan keuangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran uang yang sah sesuai dengan peraturan perundangundangan. Keterlambatan pengumpulan perwabkeu dapat mengakibatkan penundaan pencairan dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional. Syarat yang harus dipenuhi dalam pencairan dana adalah pengumpulan perwabkeu dari kegiatan yang telah dilaksanakan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2018) kerangka pemikiran adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah

diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berdasarkan landasan teori dan rumusan masalah penelitian, peneliti mengidentifikasi penjelasan terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan penulis. Kerangka pemikiran ini disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang berjudul Analisis Pelaporan dan Penyerapan Anggaran Dukungan Operasional Bhabinkamtibmas berdasarkan peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2022 yang digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Konsep yang disesuaikan untuk penelitian

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan

dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang hampir sama seperti judul penelitian penulis. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi untuk memberikan gambaran sebelum penelitian dilakukan yaitu:

1. Rike Rahmah (2015) dengan judul Analisis Implementasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pada Satuan Samapta Bhayangkara Kepolisian Resort Malang Kota. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi laporan pertanggungjawaban Keuangan Kepolisian Resort Malang Kota atas kesesuaiannya dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan tentang administrasi Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia masih belum terlaksana sesuai dengan yang diharapkan karena dalam pengumpulan laporan pertanggungjawaban keuangan terdapat sub satker yang tidak tepat waktu. Sumber-sumber seperti staf yang handal belum bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. Implementasi dapat dikatakan berhasil jika pelaksanaan administrasi laporan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan/kebijakan yang telah ditetapkan.
2. Nizar Arfani (2019) dengan judul Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Biaya Operasional pada Sat Intelkam Polres Kota Tegal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan anggaran

biaya operasional pada Sat Intelkam Polres Kota Tegal. Informan yang digunakan yaitu petugas kepolisian dan beberapa pihak yang terkait dalam penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anggaran biaya operasional pada SatIntelkam Polres Kota Tegal tahun anggaran 2016-2018 setiap tahunnya mengalami *fluktuasi* dengan kriteria efektif. Dikarenakan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk setiap tahunnya berbeda, sehingga pencapaian atau realisasinya berbeda dalam setiap tahun. Pada tahun 2016 tingkat efektivitas biaya operasional Sat Intelkam kota Tegal sebesar 99,04% dinilai efektif, sedangkan pada tahun 2017 tingkat efektivitas biaya operasional sebesar 98,46% mengalami penurunan 0,58% dari tahun sebelumnya, dan di tahun 2018 tingkat efektivitas menjadi 97,50% atau mengalami penurunan 0,77% dari tahun sebelumnya. Meski mengalami penurunan tetapi tetap berada kriteria efektif.

3. Rovika Nurvemiya (2016) dengan judul Analisis perencanaan dan penganggaran (Studi kasus pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Satuan Kerja Kepolisian Resort Malang Kota. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Kepolisian Resort Kota Malang mendapatkan alokasi dana dari APBN sebesar Rp. 70.968.732.000 yang secara garis besar dialokasikan pada program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri. Dari dana yang telah dianggarkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pada setiap program instansi tersebut, akan diberikan kewenangannya pada setiap kepala bagian atau kepala

satuan sesuai dengan bidang kerjanya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sasaran untuk pembangunan nasional dalam bidang keamanan 2015-2019 yaitu “Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat dan Mengajak Seluruh Komponen Masyarakat untuk Membantu Menjalankan Tugas Polri”, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai yaitu sebanyak 13 (tiga belas) program beserta kegiatannya. Namun kegiatan-kegiatan pada setiap program yang dilaksanakan telah sesuai dengan sasaran strategis yang tertera pada Renstra Polri, namun kali ini hanya melaksanakan 8 (delapan) program untuk mencapai 8 (delapan) sasaran strategis dengan anggaran dana yang diberikan sebesar Rp 70.968.732.000 dari APBN yang diberikan Polri kepada Satuan Kerja Polres Malang Kota melalui Kuasa PA yaitu Kapolres dan akan dialokasikan lagi kepada setiap kegiatan-kegiatan instansi untuk mendukung jalannya program yang dibentuk.

4. Misnawati, dkk (2021) dengan Judul “*Village Financial Accountability Report Assessment Presentation based on Government Accounting Principles*”. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan Informan adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan seluruh jajaran pemerintahan di Desa Padang Loang, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Pengelolaan keuangan desa berkaitan dengan kebutuhan untuk mendukung undang-undang dan utilitas. Hal terpenting adalah sumber daya manusia dengan keahlian dan dedikasi yang kredibel, yang berperan

penting dalam menyediakan pelaporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan persyaratan akuntansi pemerintah. untuk mengevaluasi penyajian laporan keuangan pemerintah Desa Padang Loang Kabupaten Cina apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang diamanatkan oleh pemerintah Indonesia. Bendahara desa yang berperan penting dalam menyusun dan mempertanggungjawabkan laporan keuangan desa. Seperti di Desa Padang Loang tercatat memiliki anggaran pendapatan yang besar dan meningkat dari tahun ke tahun. Pendapatan APBD Desa Padang Loang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejak tahun 2015 hingga tahun 2019. Terkait evaluasi penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan di Desa Padang Loang sudah cukup baik dan sesuai dengan standar akuntansi yang dianjurkan oleh pemerintah. Selain itu, prosedur pelaporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Padang Loang, baik bendahara desa kepada Kepala Desa maupun Pemerintah Desa kepada Camat dan Bupati dinilai cukup adil, transparan, dan akuntabel.

5. AdrinaUlfaHarahap, Rina Bukit, Tapi Andasari Lubis (2018) dengan judul *“Factors Affecting The Quality Of The Government’s Performance Accountability Report With Government’s Internal Control System As A Moderator Variable At North Labuhan Baru District”*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersifat kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode sensus, dengan menyebarkan kuesioner. Populasi penelitian ini adalah petugas administrasi keuangan, kepala sub bagian program dan bendahara Kabupaten Labuhan Batu Utara

dengan jumlah responden 120 orang. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penganggaran berbasis kinerja, kapasitas sumber daya, dan peran aparat pengawasan internal pemerintah terhadap kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Labuhan Batu Utara.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pengertian Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah melakukan suatu upaya dengan menggunakan suatu upaya dengan menggunakan secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya. Metodologi penelitian berasal dari kata “*Metode*” yang berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan “*Logos*” yang berarti ilmu atau pengetahuan (Narbuko & Achmadi, 2016). Jadi metodologi diartikan sebagai cara untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan “Penelitian” adalah suatu kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.

Menurut Sugiyono (2017) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang harus diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan jenis penelitian ini yang mana perolehan datanya didapat dari hasil pengamatan secara langsung ke beberapa informan yang diwawancarai lalu dilakukan analisa pada perolehan datanya kemudian ditarik kesimpulan dari hasil pengamatan tersebut. Menurut Sugiyono (2018) pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang

berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang ilmiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.

3.3 Jenis Data

3.3.1 Data Primer

Menurut Sugiyono (2017) data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti dari sumber pertama atau di tempat objek penelitian. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang di dapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer yang biasanya selalu bersifat spesifik karena disesuaikan oleh kebutuhan peneliti.

3.3.2 Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2017) data sekunder yaitu data yang tidak diberikan langsung kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari surat-surat pribadi, buku harian, notulen rapat perkumpulan, sampai dengan dokumen-dokumen resmi dari Polri. Data sekunder juga dapat berupa majalah, bulletin, publikasi, surat telegram, hasil survey, dan lain sebagainya. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah disimpulkan melalui wawancara langsung dengan beberapa informan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2017) pengumpulan data menunjukkan cara-cara yang dapat ditempuh untuk memperoleh data yang dibutuhkan penelitian. Pengumpulan data dilakukan untuk memudahkan peneliti mendapatkan informasi dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

Menurut Sugiyono (2016) mengatakan sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu:

3.4.1 Observasi

Observasi meliputi pengamatan, pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dalam hal-hal lain yang diperlukan untuk mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Observasi dilakukan untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.

3.4.2 Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur di mana akan dilakukan kepada petugas kepolisian atau pihak terkait dengan masalah yang diteliti.

Dalam teknik ini peneliti telah menyiapkan instrumen peneliti berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah dipersiapkan. Pada penelitian ini peneliti akan mewawancarai beberapa narasumber, kemudian akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait pelaporan dan penyerapan dukungan operasional kepada narasumber.

Tabel 3.1
Jumlah Responden Wawancara

NO	RESPONDEN	JUMLAH
1	Sium	1 Orang
2	Kanit Binmas	1 Orang
3	Panit Binmas	1 Orang
4	Bhabinkamtibmas	12 Orang
5	Petugas Staff	1 Orang
	Jumlah	16 Orang

3.4.3 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2017) dokumentasi adalah suatu cara yang dimanfaatkan untuk menghasilkan data dan informasi dalam bentuk buku, dokumentasi, arsip, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta suatu keterangan yang bias mendukung sebuah penelitian.

Dokumentasi merupakan catatan atau rekaman peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi biasanya berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis dan seni yang telah ada.

3.4.4 Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah bagian dari karya tulis ilmiah yang membahas penelitian terdahulu. Studi pustaka digunakan sebagai referensi ilmiah yang berhubungan dengan penelitian. Studi kepustakaan penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur, baik buku, jurnal, artikel, internet, maupun materi yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3.5 Teknik Pengolahan Data

Menurut Sugiyono (2014:244) pengolahan data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri atau orang lain. Dalam penelitian ini, teknik pengolahan data yang akan digunakan yaitu sebagai berikut:

3.5.1 Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti turun lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit, untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, meneliti hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

3.5.2 Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar katagori, *flowchart*, dan sejenisnya yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dalam hal ini peneliti akan menyajikan data dalam bentuk teks, untuk memperoleh hasil penelitian maka dapat dibantu dengan mencantumkan tabel dan gambar.

3.5.3 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam meneliti menggunakan metode kualitatif mungkin dapat membantu menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada temuan, dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang dapat berupa hubungan kasual atau interaktif hipotesis atau teori. Pada tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang diperoleh dari penelitian. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data dari kegiatan-kegiatan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari analisis pengolahan data.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, A. dan Narboku. &. (2016). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Afifah Thahira. (2018). *Pelaksanaan Pelaporan Kinerja Ditjen Binalattas Kemenaker Jakarta Selatan*.
- Carmidah. (2022). *Penguatan Tata Kelola Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pada Organisasi*. 1(2), 8–11.
- Harispon. (2018). *anggaran perusahaan*, pekanbaru.
- Kadarisman. (2016a). *Manajemen Kompensasi*. Pt. Rajagrafindo Persada.
- Kadarisman, D. M. (2016b). *Manajemen kompensasi*. Jakarta : Rajawali Pers, 2016.
- Lubis, arfan ikhsan. (2017). *akuntansi keprilakuan, akuntansi multiparadigma* (ke-3). Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik* (Cetakan Pertama).
- Misnawati, dkk (2021). *Village Financial Accountability Report Assessment Presentation based on Government Accounting Principles*, singapore.
- Nafarin. (2015). *Penganggaran perusahaan*. (edisi3). Cetakan Kedua, Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Nizar, A. (2019). *analisis evektivitas pengelolaan anggaran biaya operasional pada satintelkam polres kota tegal, politeknik harapan bersama*.
- Nurhadi, A., & Effendy, aidil amin. (2020). *Penganggaran perusahaan* (ke-1). banten: unpampress.
- Priansa, D. J. (2017a). *Komunikasi Pemasaran Terpadu Pada Era Media Sosial*.
- Priansa, D. J. (2017b). *Manajemen Pelayanan Prima*.
- Rahayu, S., Syafis, K. S., Jambi, U., Jambi, M., Akuntansi, P. S., Jambi, U., & Kampus, O. E. (2021). *Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kegiatan Organisasi Eksternal Kampus 1,2,3,4*. 3(3), 96–101.
- Rahmah, R. (2015). *Analisis implementasi laporan pertanggungjawaban keuangan pada satuan samapta bhayangkara kepolisian resort malang kota*. Ekp, 13(3), 1576–1580.
- Rosmawati, R. (2020). *analisis penganggaran belanja makanan pasien pada rumkital Dr. Midiyanto Suratani Tanjungpinng, sekolah tinggi ilmu*

ekonomi.

- Rovika, N. (2016). *analisis perencanaan dan penganggaran (studi kasus pada kepolisian resor malang kota.*
- Safitri, D. (2019). *Laporan praktik kerja lapangan pada bagian keuangan korps lalu lintas kepolisian ri (korlantas polri).*
- Simamora. (2014). *manajemen sumber daya manusia.* Edisi 1. Yogyakarta: STIE YKPN Yogyakarta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan R&D).*
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D.* Alfabeta.
- Sugiyono. (2018a). *Metode penelitian kuantitatif* (Setiyawami (ed.)). Alfabeta.
- Sugiyono. (2018b). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D.* Alfabeta.
- Tunjangan, P., Dan, K., Terhadap, K., Personil, K., Motivasi, D., Mediator, S., Pusat, P., Polri, K., Pascasarjana, P., & Terbuka, U. (2019). *Pengaruh tunjangan kinerja dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja personil dengan motivasi sebagai mediator pada pusat keuangan polri.*
- Ulfaharahap, A. (2018). *factors affecting the quality of the government's performance accountability report with government's internal control system as a moderator variable at north labuhan baru district, North Sumatra University.*
- Yudi,dkk.2021. *Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kegiatan Organisasi Eksternal Kampus.* Jurnal Inovasi, Teknologi, dan Dharma Bagi Masyarakat (JITDM). Vol.3 No.3 (2021) : Desember

CURRICULUM VITAE



BIODATA:

Nama : Radilla Elsayani

Tempat/ Tanggal Lahir : Kijang, 03 September 2001

Jenis Kelamin : Perempuan

Status : Belum Menikah

Agama : Islam

Nama Orangtua : Salim Amat Iman
Istikomah

Email : relsayani03@gmail.com

Alamat : Kp. Nosari Timur Rt.003 Rw.015 Kelurahan
Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur

RIWAYAT PENDIDIKAN:

1. SD Negeri 005 Bintan Timur Tahun 2007-2013
2. SMP Negeri 2 Bintan Timur Tahun 2013-2016
3. SMK Negeri 1 Bintan Timur Tahun 2016-2019
4. STIE Pembangunan Tanjungpinang 2019-2023